


**DATA NARASUMBER/INFORMAN
PENELITIAN**

DATA NARASUMBER 1	
Nama	Doni Aprialdi, SH.
TTL	Baserah, 25 April 1969
Jabatan Sekarang	Kadispora Provinsi Riau
Jabatan Sebelumnya (Periode Annas Maamun)	Karo Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
No. Telp/Hp	0812 7511 976
E-mail	doniaprialdi1@gmail.com

DATA NARASUMBER 2	
	
Nama	Dr. Yoserizalzen, MSn.
TTL	Indragiri Hulu, 7 November 1966
Jabatan Sekarang	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Wilayah Provinsi Riau
Jabatan Sebelumnya (Periode Annas Maamun)	Karo Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau
No. Telp/Hp	0812 7757 5666
E-mail	yoserizalzen@gmail.com

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 1	Doni Aprialdi, SH.
---------------------	---------------------------

- P : Bagaimana awal mula pengangkatan Annas Maamun sebagai Gubernur Riau dengan masa awal jabatan tahun 2014 ?
- N1 : Sepengetahuan saya Pak Annas terpilih menjadi Gubernur Riau berpasangan dengan Bapak Arsyadjuliandi Rachman sebagai wakil Gubernur Riau. Pasangan Annas–Andi terpilih melalui proses Demokrasi pemilihan Gubernur Riau Periode 2014–2019 secara Demokrasi suara terbanyak. Terpilihnya pasangan ini juga melalui proses sidang di MK karena adanya gugatan dari pasangan calon lain dan dimenangkan oleh pasangan Annas–Andi melalui keputusan MK Nomor :189/PHPU.D.XI/2013. Dan pasangan Annas–Andi dilantik tanggal 19 Februari 2014 oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di gelanggang olahraga Pekanbaru.
- P : Bagaimana kondisi pemerintahan Provinsi Riau pimpinan Annas Maamun sebelum terjadi kasus suap alih fungsi hutan senilai Rp. 2 Miliar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau ?
- N1 : Menurut saya pemerintahan berjalan normal-normal saja. Kerjasama Gubernur dan Wakil Gubernur juga bagus berjalan baik-baik saja. Terjadi guncangan setelah Pak Annas dituduhkan melakukan dugaan pelecehan kepada anak seorang pendidik Riau (Putri Soemardi Taher). Kasus ini seperti bola liar membuat ketenangan Pak Annas selaku Gubernur Riau mulai gelisah dan terganggu dengan pemberitaan-pemberitaan yang gencar tiada hentinya. Baik media Nasional maupun lokal. Tidak ada kasus lain yang menonjol selain kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. Tiba-tiba sewaktu Pak Annas di Jakarta selama 6 hari beliau OTT di rumah pribadinya di Cibubur. Semua kaget karena tiba-tiba dan langsung ditahan, kami justru mendapatkan info awal ini melalui *Running Text* Metrotv badah Sholat Magrib saat itu.

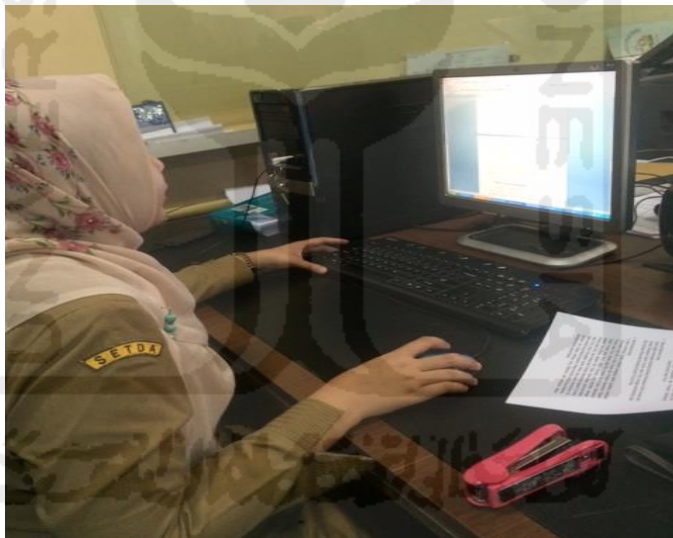
DOKUMENTASI

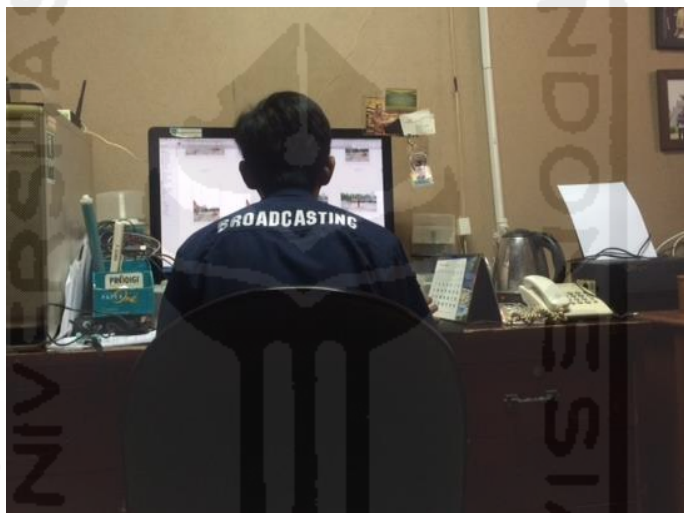
A. Lokasi Penelitian





B. Kegiatan Objek Penelitian







الجامعة الإسلامية

- P : Bagaimana kasus tersebut dapat menimpa Annas Maamun hingga akhirnya terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ?
- N1 : Kasus ini terjadi diluar dugaan kami semua, karena tidak berkaitan dengan tugas rutin beliau di Kantor, saat ditangkap beliau berada di Cibubur rumah pribadi beliau (kita tidak mengerti karena ini persoalan pribadi beliau dengan saudara Gulat).
- P : Setelah terjadinya operasi tangkap tangan tersebut, bagaimana suasana dan kondisi pemerintahan Provinsi Riau ?
- N1 : Otomatis pasca OTT suasana Pemerintahan Provinsi Riau sedikit terganggu, tetapi tidak lama, karena otomatis Wagubri dan jajaran di bawahnya tetap menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya setelah adanya SK Plt Gubri ditunjuk oleh Presiden melalui Mendagri (Wakil Gubernur sebagai Plt Gubri) barulah pemerintahan Provinsi Riau berjalan agak normal dan semakin normal setelah keluarnya kepres No.49 /P/2016 tentang pengangkatan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Definitif yang ditandai dilantiknya Bapak Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur Riau oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sumatera Utara, Kepri dan Kalsel.
- P : Apa saja dampak yang menimpa pemerintahan Provinsi Riau akibat kasus tersebut ?
- N1 : Pemerintahan Provinsi Riau dan seluruh perangkatnya termasuk seluruh masyarakat Riau kagetnya luar biasa dengan kasus yang menimpa Pak Annas Maamun sebagai Gubernur Riau, kasus ini tidak pernah terbayangkan sedikitpun sebelumnya karena Pemerintahan pasangan Annas-Andi baru berjalan beberapa bulan saja antara 6-7 bulan kemudian pemberitaan di media masa terutama media Nasional sangat bombastis dan menyudutkan Pemerintahan Provinsi Riau yang sangat korup dengan alasan sudah 3 (tiga) orang Gubernur Riau ditangkap dan hal ini sangat memalukan bagi Pemerintah dan Masyarakat Riau itu

sendiri. Satu yang berbuat semuanya kena. Itulah kondisi psikologi yang dirasakan pemerintahan dan masyarakat Riau akibat dari kasus Pak Annas Maamun tersebut.

P : Apakah kasus suap yang menimpa Annas Maamun menyebabkan krisis pada pemerintahan Provinsi Riau ? Jika iya, krisis seperti apa yang ditimbulkan ?

N1 : Krisis di Pemerintahan Provinsi Riau tidak pernah terjadi, kata yang pantas adalah Pemerintahan Provinsi Riau mengalami kegoncangan itu benar dan tidak berlarut-larut karena pemerintahan Riau tetap ada dan berjalan dengan baik tapi memang diakui terasa melambat karena faktor ketakutan dari semua elemen jenjang pemerintahan ditambah dengan adanya proses assesment dan peraturan baru lainnya sehingga Plt Gubernur Riau tidak bisa dengan leluasa mengangkat dan melantik Pejabat setingkat Kadis/Kaban/Biro di tingkat Provinsi (Kepala SKPD) dikarenakan harus melalui *Open Biding*/Panitia seleksi pannel (*Assesment*) sehingga berakibat penempatan aparatur untuk mengisi SKPD sedikit terhalang yang berakibat kepada realisasi APBD pada tahun 2014 tersebut sedikit anjlok yaitu hanya sebesar 60 %.

P : Lalu, bagaimana pola pengambilan keputusan oleh pemerintah Provinsi Riau pada saat terjadi krisis ?

N1 : Pemerintahan Provinsi Riau pasca OTT nya Pak Annas Maamun sebagai Gubernur Riau berjalan seperti biasa walaupun otomatis sedikit melambat itu hanya dikarenakan kewenangan yang dimiliki Wakil Gubernur tidak serta merta sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh seorang Gubernur. Menjelang dikeluarkan surat Plt gubernur oleh Presiden RI melalui Mendagri, Pemerintahan Provinsi Riau berjalan seperti biasa saja hanya menjalankan rutinitas pemerintahan seperti biasa setelah Plt ditunjuk barulah Pemerintahan Provinsi Riau berjalan agak normal apalagi setelah definitif sampai hari ini berjalan sangat baik.

P : Bagaimana tindakan pemerintah Provinsi Riau terkait upaya penanganan krisis tersebut ?

- N1 : Pemerintahan berjalan dengan baik walaupun gelombangnya sangat terasa. Krisis kepemimpinan itu tidak terasa karena Wakil Gubernur ada dan bisa menjalankan roda pemerintahan dengan jajarannya walaupun agak melambat itu hanya dikarenakan kewenangan yang dimiliki Wakil Gubernur tidak sama dengan Gubernur menjelang adanya SK Plt Gubernur maupun definitive.
- P : Apakah ada upaya penyampaian klarifikasi atau pemberian statement khusus oleh pemerintah Provinsi Riau terkait krisis yang terjadi ? Jika iya, oleh siapa dan bagaimana ?
- N1 : Tidak ada, karena sistem sudah berjalan di bawah kendali Wakil Gubernur otomatis Wakil Gubernur menjalankan roda pemerintahan sesuai kewenangan yang dimilikinya. Dengan berjalannya waktu, kewenangan itu diperoleh setelah adanya Sk Plt dan Definitif Gubernur Riau yang diberikan dan ditandai dengan pelantikan Gubernur Riau dan Gubernur lainnya di Istana Negara oleh Presiden RI.
- P : Apakah ada upaya pembentukan staff khusus untuk penanganan krisis yang terjadi ? Jika iya, staff khusus apa ?
- N1 : Tidak ada, karena Gubernur/Wakil Gubernur Riau secara struktur telah memiliki perangkat yang lengkap seperti staf ahli dan kepala SKPD yang lengkap sehingga tak perlu ada staf khusus yang menangani krisis yang dimaksud.
- P : Bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan saat masa krisis ? Serta ditangani oleh siapa komunikasi krisis yang dilakukan tersebut ?
- N1 : Tidak terjadi krisis dalam artian Pemerintahan Provinsi Riau berjalan seperti biasa hanya saja melambat dikarenakan Gubernurnya OTT oleh KPK tentu perasaan kaget dari semua elemen dan seperti mendadak kejadiannya
- P : Pada saat kasus tersebut terjadi, bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Plt. Gubernur Riau?
- N1 : Tentu Wakil Gubernur Riau dan seluruh elemen perangkat daerah tetap dan akan tetap menjalankan roda pemerintahan walaupun dengan

kewenangan yang sangat terbatas saat itu, namun setelah adanya Sk Plt Gubernur Riau yang dikeluarkan Presiden melalui Mendagri kewenangan itupun masih simpang siur dikarenakan banyaknya penafsiran kewenangan Plt Gubri.

P : Setelah masa krisis berakhir, bagaimana sistem pemerintahan Provinsi Riau berjalan ?

N1 : Berjalan normal seperti biasanya Pemerintahan Provinsi Riau berjalan di bawah kendali Gubernur Riau defenitif dan jajarannya.

P : Apakah ada komunikasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau setelah krisis berakhir ? Jika iya, komunikasi seperti apa ?

N1 : Tidak ada.

P : Lalu, bagaimana masa jabatan Annas Maamun sebagai gubernur Riau periode 2014-2019 berakhir ?

N1 : Bapak Annas Maamun setelah OTT langsung TSK dan ditahan di KPK setelah itu dinonaktifkan dan diberhentikan berdasarkan kepres No.... dan mengangkat Wakil Gubernur Riau sebagai Gubernur Riau melanjutkan periode kepemimpinannya sampai 2019.

P : Setelah masa kepemimpinan Annas Maamun berakhir, apakah suasana pemerintahan kembali seperti semula ?

N1 : Suasana normal seperti biasa karena pemerintahan tidak boleh berhenti melayani masyarakatnya dan Gubernur Riau definitive kembali menjalankan program yang telah mereka janjikan dalam masa kampanye dahulu dan bahkan Gubernur Riau Bapak Arsyadjuliandi Rachman memberanikan diri pada ulang tahun Provinsi Riau yang ke-59 membuat tagline "*Riau the Homeland of Melayu*" dan mencanangkan melalui Kementerian Pariwisata RI "Riau Menyapa Dunia" dengan program kepariwisataannya Riau akan berbenah untuk menjadi daerah destinasi wisata di Republik Indonesia.

P : Menurut Bapak, apakah kasus suap yang menimpa Annas Maamun mempengaruhi citra pemerintah Provinsi Riau di mata masyarakat ? Jika iya, seperti apa ?

- N1 : Pasti, Masyarakat Indonesia senusantara otomatis menuduh Pemerintah Provinsi Riau korup (karena sudah 3 Gubernur Riau yang ditahan/dipenjarakan). Semua ini harus kita terima karena kenyataannya seperti itu. Kedepan hal ini tentu menjadi cambuk agar Pemerintahan Provinsi Riau bisa membuktikan tidak ada lagi KKN di dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Provinsi Riau. Pelan tapi pasti di bawah komando Gubernur Riau Bapak H. Arsyadjuliandi Rachman nuansa pemerintahan bersih sudah mulai terasa kembali. Kepemimpinannya yang bersahaja dan terkesan sangat hati-hati mengambil keputusan telah menjadikan Pemerintahan Provinsi Riau sejuk jauh dari kesan menabrak rambu-rambu atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- P : Jika kasus tersebut mempengaruhi citra pemerintah Provinsi Riau, apakah ada upaya *recovery* atau pemulihan citra pasca kasus tersebut ?
- N1 : Pemulihan nama baik hanya bisa dilakukan oleh aparaturnya pemerintah yang menjalankan roda pemerintahan itu sendiri, tentu dengan jalan stop KKN tingkatkan kompetensi SDM dengan berbagai jalan seperti *Open Biding/Pansel Assesment* dan lain-lain sehingga citra Pemerintahan Provinsi Riau ke depan akan jauh lebih baik dan bersih.
- P : Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kasus tersebut sepengetahuan Bapak ?
- N1 : Masyarakat Riau wajar saja marah dan kecewa melihat keadaan ini karena masyarakat Riau berharap pemerintahan itu bersih dari KKN karena mereka beranggapan aparaturnya pemerintah itu sudah mendapatkan gaji yang layak dan memadai, kemarahan masyarakat tentu beralasan dan saya yakin sepanjang pemerintahannya bersih tentu akan didukung secara penuh oleh masyarakatnya.
- P : Menurut Bapak, apakah ada perbedaan antara citra Pemerintah Provinsi Riau sebelum terjadi krisis dengan citra Pemerintah Provinsi Riau setelah terjadi krisis ? Jika iya, perbedaan seperti apa ?

- N1 : Pasti ada, waktu terjadinya OTT tersebut kondisi Pemerintahan Provinsi Riau jelas sangat terpuruk dengan pemberitaan yang sangat dahsyat oleh beberapa TV nasional maupun lokal tentang prosesi menjelang dan sedang terjadinya OTT tersebut namun dengan berjalannya waktu dan semakin normalnya pemerintahan dibawah kendali Gubernur Riau definitive yang sangat santun dan sederhana, maka pelan tapi pasti Pemerintahan Provinsi Riau dari hari ke hari berjalan dengan baik dan lancar dan diakui oleh masyarakat Riau dan menadapat dukungan penuh dari apartur yang solid begitu juga dari kalangan Forkompinda yang kompak di Pemerintahan Provinsi Riau (Kapolda, Kajati, Kapengti, Danrem, Pimpinan DPRD Prov, Danlaud dan unsur lainnya).
- P : Setelah krisis berakhir, bagaimana pola pengambilan keputusan yang dilakukan di pemerintahan Provinsi Riau ?
- N1 : Berjalan normal Gubernur Riau mengendalikan roda pemerintahan bersama DPRD Provinsi Riau dan seluruh Forkompinda dan Perangkat SKPD yang ada.
- P : Berdasarkan kasus tersebut, apakah ada evaluasi yang harus dilakukan terkait upaya penanganan krisis pada pemerintahan Provinsi Riau ? Jika iya, seperti apa ?
- N1 : Evaluasi senantiasa berjalan terus baik internal maupun eksternal. Internal tentu melalui BPK, Inspektorat Kemendagri maupun Inspektorat Provinsi, sedangkan eksternal KPK membuka diri untuk dijadikan penggandengan (untuk berdiskusi dan mohon arahan) dengan Pemda yang dianggap rawan dan yang sedang tertimpa masalah.
- P : Menurut Bapak, jika terjadi kasus yang serupa di kemudian hari bagaimana seharusnya Pemrov. Riau menyikapi hal tersebut ?
- N1 : Insya Allah tidak akan terjadi lagi karena rasa ketakutan masih terasa sampai saat ini, kesadaran penuh dalam menjalankan tugas dengan kewenangan yang dimiliki tentu akan membuat kita sadar betul dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing aparaturnya pemerintah daerah.

Kuncinya kuasai tugas pokok dan fungsi dan kenali kewenangan sehingga tidak melanggar aturan yang ada.

Keterangan :

P : Pewawancara

N1 : Narasumber Pertama



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 2	Dr. Yoserizalzen, MSn.
---------------------	-------------------------------

- P : Kan Dwi ambil judul tentang komunikasi krisis pemerintahan, om. Kasusnya pas eee suap Annas Maamun, suap alih fungsi hutan 2 Miliar Kuantan Singingi itu.
- N2 : Oh lahan ya ?
- P : He eh. Nah jadi, kemarin pas cari-cari judul ada Dwi baca di portal berita *online* itu om kalau Sekretaris Daerah terkait kasus tersebut mengumpulkan staff Sekretariat Daerah.
- N2 : Sekda ?
- P : He eh. Nah jadi penasaran kan om, kemarin itu waktu ada dikumpulin itu, apakah membahas upaya penanganan krisisnya atau gimana gitu om ?
- N2 : Jadi ?
- P : Jadi kemarin terkait kasus tersebut, itu termasuk krisis atau ngga om ?
- N2 : Yang ?
- P : Yang kasus suap Annas Maamun itu om ?
- N2 : Krisis ?
- P : Iya, krisis itu kan bisa karena ada kemunduran citra pemerintahan ?
- N2 : He eh. Tentu krisis. Tapi itu kan persoalan pribadi. Masalah perseorangan. Tapi yang menjadi masalah itu eee jadi kan ini Gubernur ketiga yang menjadi permasalahan pokok. Jadi perlu menjadi tanda tanya besar. Ada apa ? Untuk menangani ini, tidak perlu kita menjustifikasi Annas Maamun. Tak mungkin akibat tanpa sebab. Penyebabnya apa tentu ada jaringan-jaringan yang perlu diselesaikan. Ada yang disuap tentu kan ada yang memberi suap. Terus ada negosiasi dan segala macam, tentu itu kan berdampak pada kaitan hukum. Jadi suatu jaringan itu sudah berakar-akar. Sudah berantai-rantai. Itu yang jadi masalah, persoalan ini tentu menjadi krisis. Krisis itu tidak hanya di pemerintahan. Kalau kita lihat kasusnya, itu juga terjadi pada pihak swasta. Jadi pihak swasta pun krisis juga.

Sama-sama. Kalau pihak swasta tidak memberi peluang, tidak memberikan *chance*, tidak memberi kesempatan tentu dia menjadi sesuatu yang lain.

P : Terus kemarin sistem pemerintahannya gimana om pas waktu Annas ditangkap itu om ?

N2 : Sistem pemerintahan biasa-biasa saja. Yang ditangkap itu kan Annas Maamun, bukan Gubernurnya. Tetapi memang Annas Maamun sebagai Gubernur. Tapi kan kasus perseorangan. Pemerintahan tetap jalan. 42 SKPD yang ada tetap jalan sesuai fungsi-fungsinya masing-masing. Misalnya, kalau Biro Humas, menjalankan fungsi humas. Begitu juga dengan kepala staff yang lain. Tidak mungkin terhambat cuma karena itu aja. Sistem pemerintahan tidak mungkin terhambat karena masalah perseorangan, masalah pribadi.

P : Kalau waktu oom sebagai kepala Biro Humas kemarin, Humasnya ada menyampaikan *statement* khusus ngga om terkait kasus tersebut ?

N2 : Ada. Ketika Pak Annas ditangkap yang pertama dihubungin itu pihak Humas. Rumah om ditunggu wartawan. Ada mobil siaran langsung Metro TV, ada mobil siaran langsung TV One di depan rumah itu. Menunggu minta *statement*. Itu hal yang wajar. Karena mungkin mengapa media mencari humas karena pada saat itu kan mereka belum bisa berhubungan dengan orang yang ditangkap yang namanya Annas Maamun itu. Tetap yang dicarinya juru bicaranya untuk meminta informasi. Walaupun mungkin juru bicaranya ndak tau, belum dapat juga perkembangan itu. Kita sebagai humas juga tahunya melalui media. Dari media juga kita tahu kalau Annas Maamun ditangkap. Sebagai juru bicara tentu mencari jawaban-jawaban yang normatif. Kita tak mungkin lepas. Tak mungkin pula kita melarikan diri dari pertanyaan itu.

P : Jadi kemarin oom menyampaikannya gimana om ?

N2 : Ya menyampaikan tentulah kita normatif. Walaupun dia tertangkap, tapi kita tetap harus berpikiran dengan asas praduga tidak bersalah. Biarlah

hukum, melalui proses-proses hukum saja. Namun demikian, proses pemerintahan harus tetap berjalan.

P : Humas punya portal berita kan ya om ya ?

N2 : Ada.

P : Ada. Disitu ada di-*post*-ing tentang kasus tersebut ngga om ?

N2 : Ngga ada. Karena kan di Humas itu eee ketika itu terjadi disibukkan dengan persoalan wartawan-wartawan itu. Kita juga belum punya orang yang langsung bisa bikin berita. Kita mestinya punya wartawan, punya penulis yang bisa membikin suasana tenang di tengah-tengah persoalan itu kan. Tapi kita kan belum melakukan itu. Jadi hanya melalui media massa, melalui rekan-rekan wartawan kita coba memberikan semacam penenang atas hiruk-pikuk dari persoalan-persoalan Annas Maamun.

P : Kemarin ada instruksi dari Sekda-nya ngga om harus melakukan langkah apa gitu ada ya om ya ?

N2 : Waktu itu tidak ada instruksi dari Sekda. Sekda yang lama ya. Karena mungkin ya ee artinya tidak ada rapat-rapat khusus yang membahas soal itu. Humas hanya berjalan sendiri sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai juru bicara. Ada empat bagian itu jadi kita menjalankan sesuai fungsi itu. Apa yang kita lakukan kita laporkan ke Sekda, walaupun tidak ada instruksi tertulis dari Sekda untuk kita mesti melakukan sesuatu, langkah-langkah untuk tindakan itu.

P : Terus om, menurut oom di mata masyarakat gimana pandangannya om terkait citra Pemerintahan Provinsi Riau setelah terjadi tiga kali kasus itu om ?

N2 : Mmm.. masyarakat ya itu kan tergantung *person*-nya. Dalam kebudayaan Melayu tidak ada istilah itu. Itu kan terkait pribadi orang itu. Kita tidak bisa juga terlalu mengaitkan itu perilaku pemerintahan. Karena itu perseorangan. Jadi kita tidak bisa juga menyebut itu kebudayaan. Ada yang mengatakan, ini tiga pimpinan di Riau, itu langsung menjustifikasi kalau itulah Melayu. Kan tidak. Kan tipe pemimpin dalam Melayu itu sudah jelas di dalam Gurindam 12, dalam tunjuk ajar Melayu, kan jelas

tipe-tipe pemimpin. Misalnya dalam Gurindam 12 disebutkan “cari olehmu akan guru, yang boleh tau akan setiap ilmu”. Pernah baca Gurindam ?

P : Pernah.

N2 : “Cari olehmu akan sahabat, yang boleh dijadikan obat”. Nah itu kan filsafat-filsafat, petuah-petuah yang ditunjukkan dalam nilai-nilai sastra, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai mm kalau dalam kebudayaan itu nilai-nilai tak terhingga yang diamalkan dalam Gurindam, dalam tunjuk ajar, pantun-pantun, biasanya berangkat dari Hadits Qur’an. Itu ciri-ciri pemimpin Melayu. Kalau ini kan masalah pribadi. Kalau pribadi kan tiap *person-person*. Kita tidak bisa juga mengutuk Riau ini, pemerintahan. Itu kan perseorangan. Kalau itu salah Riau, semua pegawai negeri tentu masuk penjara. Kalau itu kesalahan pemerintahan. Tapi ini kan permasalahan pribadi.

P : Terus waktu pergantian itu om, waktu Plt. diangkat itu ada beda ngga om sistem pemerintahannya ? Ngga ada ya om ?

N2 : Sistem pemerintahan sama. Tapi mungkin pola kepemimpinan sekarang agak berbeda. Kalau ee biasalah kan setiap manusia punya ciri sendiri dalam memimpin. Dia ngga mungkin sama. Si A ngga mungkin sama dengan si B. Om juga memimpin pustaka ini juga ngga bisa disamakan dengan pemimpin terdahulu. Walaupun sebelum om yang terpilih, sama yang dulu juga tidak bisa disamakan. Jadi tentu punya cara untuk melakukan pendekatan. Jadi tentu pola pemerintahan dari Pak Annas dan Pak Andi ini berbeda dari kehati-hatiannya. Kalau Pak Andi ini lebih banyak mm berdiskusi dengan staff daripada Pak Annas. Pak Annas itu kan kesannya otoriter. Apa kehendak dia harus dilaksanakan, walaupun itu bertentangan dengan hukum mungkin ya. Kalau Pak Andi ya dia hukumnya dia lihat, dampaknya, baru dia diskusikan. Nah keterbukaan masa Pak Andi sekarang juga berbeda. Kalau dulu kan tidak semua pegawai bisa berhubungan sama Pak Annas. Kalau sekarang Pak Andi

memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi PNS untuk berkomunikasi dengan dia. Nah itu.

P : Jadi kalau untuk perbaikan citranya om ada usaha om ?

N2 : Ada usaha, dengan melakukan pemilihan pejabat dengan *open bidding*. *Assessment*. Nah ini kan, itu kan pola baru. Baru pertama kali Riau melakukan lelang terbuka itu untuk semua jabatan. Nah biasanya orang melakukan lelang jabatan untuk mengisi yang kosong. Misalnya, kepala Badan Pustaka dan Arsip ini pensiun, baru dilelang. Nah kalau Pak Andi, semua jabatan dilelang. Nah kita *open bidding* atau rekrutmen melalui lelang terbuka. Itu sistem pemerintahan. Nah sekarang evaluasi dilakukan setiap saat. Misalnya, ee perlambatan realisasi anggaran nah itu dibahas. Kita dipanggil diminta ee kepala SKPD diminta pertanggungjawaban. Kalau rendah, mengapa rendah. Nah biar terbuka. Memang lebih terbuka sekarang daripada dulu. Kita bisa tahu apa yang dilakukan.

P : Terus untuk pola komunikasi antar staff-nya lebih terbuka berarti om ?

N2 : Sekarang pola komunikasi antar staff lebih terbuka. Sekarang asas keterbukaan lebih diterapkan di Pemerintahan Provinsi Riau. Dibuktikan dengan adanya jaringan-jaringan informasi melalui *e-government*. Nah itu kan pola keterbukaan. Anggaran juga lebih dibuka. Pak Andi ini orientasinya lebih kepada *public oriented*.

P : Kalau Annas kemarin ngga ya om ?

N2 : Nah kalau Annas kemarin itu masih baru mungkin ya. Mungkin karena belum setahun jadi kita ngga tau juga polanya bagaimana. Tapi dari sekian bulan masa kepemimpinan Pak Annas itu, memang terlalu banyak sekatan-sekatan. Jangankan staff, pejabat aja tidak bisa langsung berurusan dengan Pak Annas. Harus melalui orang-orang tertentu. Kalau sekarang kita bisa berurusan dengan Pak Gub, bisa berkomunikasi.

P : Waktu masa kasus Annas Maamun berakhir itu om, pemerintahan lebih kondusif ya om dibanding saat kasus terjadi ?

N2 : Iya. Kan waktu masa pemerintahan itu, situasi itu mencekam. Kita kerja itu seperti kita bekerja di sebuah kerajaan.

P : Kalau ini lebih enak om ?

N2 : Ya kalau ini lebih bisa merasakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu kan lima, *planning, actuating, organizing, controlling*, ada lima aspek. Nah sekarang aspek itu jalan. Misalnya, *planning*. Kita sama-sama merencanakan. Tiap-tiap kepala SKPD juga melaksanakan program-program, nah itu bagian dari *actuating*. Ada *organizing, controlling*. Semua jalan. Ya sampai *controlling*. *Controlling*-pun Pak Gub sekarang melalui jajarannya melakukan pengawasan pada setiap SKPD. SKPD itu diawasi. Pak Andi juga lebih ngemong lah. Lebih diskusi. Bisa bertukar pikiran dengan beliau. Nah artinya kepala SKPD, ketuanya juga diuji kan. Kalau dulu kita dalam tekanan, mana bisa kita berpikir lagi. Nah sekarang kita ditantang, bikin program, bikin inovasi yang terbaru, nah terus kita harus lakukan itu. Alhamdulillah, dampaknya terlihat pada perpustakaan. Pada tempat om yang baru ini. Kita dikasih penghargaan. Kita terakreditasi. Artinya dari diskusi dengan Gubernur sekarang kita bisa berinovasi, dan dampaknya ada prestasi. Ada prestasi dari nasional, ada juga prestasi dari pemerintah. Perpustakaan sendiri tidak pernah ada akreditasi, sekarang sudah A. Itu dari nasional. Terus dapat A lagi dari ombudsman RI. Ada beberapa prestasi yang kita raih karena keterbukaan itu. Kita dikasih kebebasan, tetapi dalam keterikatan. Terakhir nanti kita termasuk, kepala pustaka ini tanggal 26 Oktober akan bertarung dengan tiga kepala perpustakaan lain di Indonesia. Tiga itu, Bandung, Jawa Barat dan Jogja. Artinya, Riau merupakan salah satu, kepala pustaka Riau merupakan salah satu yang ikut bertarung. Yang masuk empat besar. Kalau diurut sekarang kita empat besar. Tapi kalau kita dapat nomor satu, kan lebih hebat lagi. Artinya itu kan tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan dengan kepala daerah, Gubernur. Lebih terbuka, jadi kita pun juga berprestasi. Tentu kita tidak akan melakukan hal-hal yang sifatnya koruptif, hal-hal yang menyalah. Ke kantor juga, dulu kalau kita ke kantor, orang-orang masuk aja minta kegiatan. Nah itu kan mempengaruhi psikologis pemimpin juga. Kalau Pak Gubernur

sekarang juga kita diberi tunjangan besar, tapi diiringi dengan kinerja juga.

P : Kalau pas om jadi Karo Humas kemarin om, kalau untuk menangani krisis dari pemerintahan itu seharusnya gimana om upaya-upayanya terlepas dari kasus Annas itu om ?

N2 : Iya, kalau Humas itu kan kita tetap menggunakan media massa. Apapun terjadi, media massa itulah sahabat kita. Media massa itulah istri kita. Media massa itu kunci segala-galanya. Pencitraan Pak Annas jelek ini juga tidak terlepas dari media massa. Kalau banyak persoalan-persoalan sebelum itu kan galau itu pelecehan seksual, nah itu kan akibat dari tidak adanya komunikasi dengan media massa. Humas itu juga kan, kita menjadi jembatan dari suatu kasus, antara Pak Annas dan wartawan. Nah kita berada di tengah-tengah. Mau ke Pak Annas kita kena marah, mau ke wartawan nah wartawan juga dituntut oleh kantornya untuk cari berita. Tidak mungkin tidak. Jadi kan kita memahami juga. Artinya kita menjelaskannya, ya om juga ngomong ke Pak Annas, “Bapak bersumpah sama saya ajalah kalau Bapak tidak melakukan, biar saya bilang ke wartawan.” Terus dia bersumpah, “aku bersumpah ndak melakukan dan segala macam.” Oom sampaikan ke wartawan kalau dia tidak melakukan. Nah artinya kan setelah itu baru mulai reda kan. Persoalan kasus itu mereda. Nah sistem komunikasi Humas itu juga dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kalau Humas itu tidak gesit, habis juga.

P : Berarti menjalin dengan media itu yang penting ya om ya ?

N2 : Itu yang lebih penting. Itu yang paling penting.

P : Kalau dari Humas, oom aja yang mengeluarkan pernyataan ya om ya ?

N2 : Iya. Itu sudah jelas. Ndak mungkin semua pula mau bicara. Yang bagian-bagian lain itu lebih ke teknis. Mengumpulkan data. Tidak mungkin pula semua berbicara. Jadi itu disepakati. Cuma ketika Pak Annas, orang-orang Pak Annas jadi jubah juga. Orang-orang yang di luar. Yang bukan pemerintahan.

P : Ada juga ya om ?

- N2 : Ada. Soalnya semua merasa berhak jadi juru bica Pak Annas. Padahal orang non-pemerintahan. Berbeda dengan Pak Andi ini, ditetapkan kalau bukan Sekda yang berbicara, Humas saja yang berbicara. Dulu kan karena ada orang luar, jadi semrawut.
- P : Iya ya om, bisa ada salah informasi kan kalau gitu kan om ?
- N2 : Haa.. itu kan salah. Kita kan disekolahkan. Kita ada diklat. Kalau orang-orang luar itu kan tidak ada itu. Kita punya UU, Peraturan Pemerintah untuk tidak berlaku macam-macam. Kalau orang luar kan tidak ada. Mungkin kan tidak ada berkaitan dengan perundang-undangan.
- P : Jadi om dengan menjalin hubungan dengan wartawan untuk penanganan krisisnya gitu aja om ?
- N2 : Iya.
- P : Ngga ada perencanaan awal, gitu-gitu om ?
- N2 : Ada. Kita menyiapkan data. Tak data aja, dana juga kita siapkan. Hehehe dana itu bukan berarti kita untuk menyogok media. Kita kan kadang-kadang mengadakan *press conference*, *coffee morning*, gitu kan dianggarkan dari APBD. Tapi kan ada juga yang tidak dianggarkan, seperti minum-minum di kedai kopi, gitu kan. Kita kan juga tidak hanya hubungan sama wartawan, hubungan dengan masyarakat juga. Jadi banyak yang harus dipersiapkan.
- P : Oh jadi ngadakan kayak *coffee morning* gitu ya om ?
- N2 : *Coffee morning*, kadang kita juga mengunjungi media. Tujuannya silaturahmi. Lebih mengakrabkan diri. Yang penting bagi om itu, memanusiakan manusia. Lebih memanusiakan manusia.

Keterangan :

- P : Pewawancara
N2 : Narasumber Kedua

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 3	Eriadi Fahmi
---------------------	---------------------

P : Jadi om masalah kasus kemarin itu menjalin hubungan dengan medianya gimana, om ?

N3 : Maksudnya ?

P : Menjaln hubungan dengan media massanya. Kan ada dikerumunin sama wartawan kan, om ?

N3 : Wartawan ya ?

P : Iya om. Wartawan nasional atau wartawan lokal, om ?

N3 : Karena ini menjadi topik berita yang hangat luar biasa. Dari seluruh wartawan, mulai dari wartawan nasional, wartawan lokal, ee mempertanyakan tentang kasus-kasus tersebut. Kita komunikasi yang baik saja. Tetap komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media. Silaturahmi. Menjelaskan ee yang kita tahu.

P : Tahapannya gimana itu om ?

N3 : Tahapan menjelaskannya itu ?

P : Iya om

N3 : Tahapannya. Kan ini kepentingan media untuk mengetahui berita itu kan sangat besar. Secara otomatis rekan-rekan wartawan memburu berita itu. Dan kita di Humas sebagai hubungan komunikasi dengan mereka, juru bicara juga. Tentu didatangi oleh mereka. Haa itulah kita menjalin komunikasi yang baik dengan rekan-rekan media yang ada. Baik itu media lokal maupun nasional yang ada di Riau. Kan ada kontributor-kontributor di Riau. Kemudian kita ajaklah, entah itu semacam *coffee morning*, kita temui mereka, kita datangi. Intinya, menguatkan lagi silaturahmi. Mengeratkan lagi komunikasi. Kan sudah lama terjalin dengan baik ini komunikasi dengan wartawan.

P : Kalau untuk mengeluarkan *statement* resmi itu om, kewenangan siapa ?

N3 : *Statement* resmi itu ?

- P : Terkait kasus tersebut om.
- N3 : Terkait kasus itu eeehm.. ini agak berat ni. Janganlah, awak ini kroco-kroco masalahnya. Nanti salah jawab haha itu kan masalah hukum. Disini kan ada biro hukum. Kemudian kalau masalah kasus seperti itu, kan tentu ada pengacaranya. Kalau sebelum ada kasus itu, kan ada biro hukum.
- P : Terus kalau menurut oom, ada perbedaan citra pemerintah Provinsi Riau ngga om terkait kasus tersebut ?
- N3 : Nah ini ada. Tapi itu sebagai cambuk bagi pemerintah Provinsi Riau. Sebagai cambuk, sebagai peringatan terutama bagi kami-kami dari staff. Sebagai pelajaran untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang.
- P : Terus untuk upaya pengembalian citra pemerintahan itu dari pihak Humas ada melakukan upaya ngga, om ?
- N3 : Kita sebagai humas tentu berupaya memberikan publikasi yang cukup. Memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif tentang pemerintah Provinsi Riau. Jadi kita terus berupaya memberikan pemberitaan-pemberitaan yang positif, lebih terbuka kepada media-media. Kemudian lebih intens menyampaikan berita-berita. Lebih intens, lebih transparan lagi. Dan tentunya kita berharap dengan adanya kasus ini menjadi pelajaran untuk generasi yang berikutnya. Generasi kami-kami.
- P : Kalau untuk siaran pers, gitu-gitu, ada om ?
- N3 : Ada. Kita sering siaran pers. Siaran pers tentang kegiatan-kegiatan Gubernur, kegiatan pemerintah Provinsi Riau kita sampaikan melalui siaran pers ke media cetak, media elektronik, media online sekarang ada, website dirilis-rilis kegiatan. Setiap kegiatan kita rilis. Namun, ada juga wartawan-wartawan yang meliput secara langsung. Kalau wartawan kan mungkin mengambil *angle* beritanya kan sesuai dengan perspektif mereka lah. Kalau untuk kita kan disiapkan juga sesuai dengan versi kita lah. Jadi pembangunan-pembangunan, program itu kita komunikasikan langsung ke masyarakat.

P : Masa transisi pergantian Gubernur kemarin itu om, perbedaan sistem pemerintahannya terlihat jelas ngga om ?

N3 : Mmm... Sama aja sih. Pemerintahan kan sistemnya sudah ada. Kalau di pemerintahan kan sudah ada SOP-nya. Cuma gaya kepemimpinannya beda. Bisa dilihatlah oleh semua masyarakat Riau. Kami menyesuaikan saja. Mungkin kita bertugas sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi).

P : Dengan adanya kasus tersebut, tugas tetap jalan ya om ?

N3 : Tetap jalan.

P : Melambat atau ?

N3 : Tidak ada masalah.

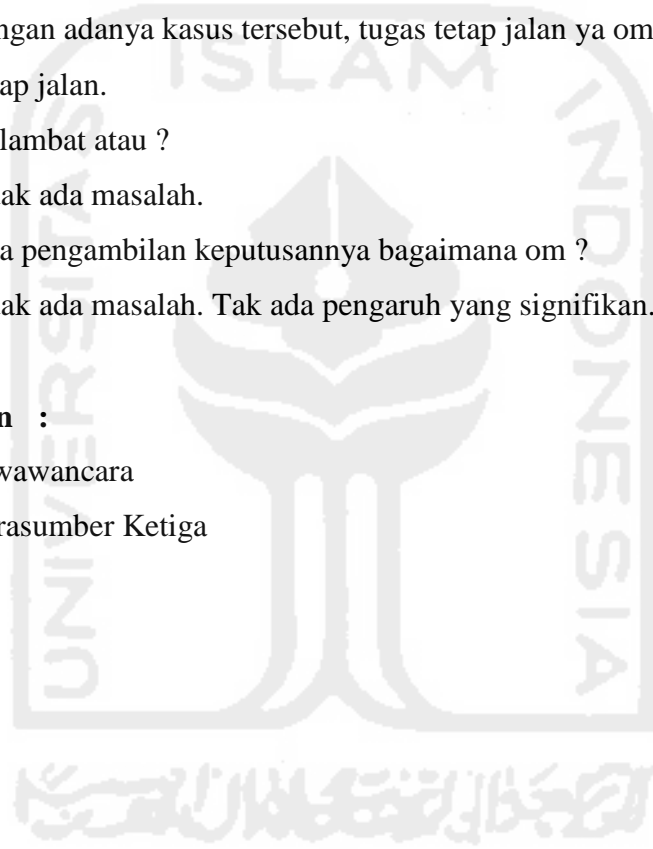
P : Pola pengambilan keputusannya bagaimana om ?

N3 : Tidak ada masalah. Tak ada pengaruh yang signifikan.

Keterangan :

P : Pewawancara

N3 : Narasumber Ketiga



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 4	H. Helmi Burman
---------------------	------------------------

- P : Bagaimana sebenarnya kisah tentang kasus Annas Maamun itu, Pak ?
Sepengetahuan Bapak ?
- N4 : Kasus Pak Annas ini berawal dari memang sifatnya Pak Annas ini. Beliau ini ketika jadi Bupati otoriter. Semua orang tidak bisa memberi saran, tidak bisa memberi nasihat. Semua dijalankan tidak mengikuti prosedur situasi pemerintahan. Jadi kalau istilah zaman sekarang, seenak perutnya aja. Semua hal mana teringat. Jadi, eee. Dan ditambah lagi sifat mungkin karena polosnya orang tua ini, ee selama dua periode memimpin Kabupaten Rohil, jadi telah terlalu lama. Jadi menganggap semua hal itu remeh. Jadi semua bertumpu pada beliau. Itu aja. Terus ditambah lagi masalah tamak, itu aja.
- P : Terkait dengan kasus suap alih fungsi hutan Rp. 2 M di Kuantan Singingi, Riau itu. Bagaimana kasus tersebut dapat naik di media massa ?
- N4 : Itu. Karena ini Pak Annas tidak mengerti masalah situasi pemerintahan, maka semua hal dilakukan tanpa prosedur. Tanpa mengikutsertakan pihak-pihak lain, seperti anggota DPRD Riau, disposisi atau saran dari staff. Jadi, apapun yang dilakukan Pak Annas waktu itu secara administrasi salah. Dan langsung dari Menteri Kehutanan. Dan itu jelas, banyak sekali orang-orang yang akan memberitahukan kepada media pastinya.
- P : Lalu bagaimana pada masa itu pemberitaan di media lokal maupun nasional terkait kasus tersebut ?
- N4 : Ya tetap saja, semua sama. Semua memberitakan sama, karena sudah terbuka seperti itu. Tak ada lagi sebenarnya macam-macamnya.
- P : Apakah informasi tentang kasus tersebut dapat diterima secara terbuka oleh wartawan ? Atau tertutup dari pemerintahan ?

- N4 : Pemerintah waktu itu lebih banyak menutup diri. Pejabat-pejabat juga. Karena ini menyangkut orang nomor satu di Riau. Terus lebih banyak sungkannya. Terus di pihak lain, sumber lain terbuka. Seperti DPRD, Menteri Kehutanan, dan KPK terbuka.
- P : Terus untuk memuat informasi di media massa, pola pengumpulan informasi tersebut biasanya bagaimana jika tertutup seperti itu dari pihak Annas ?
- N4 : Tidak masalah. Asal sumber-sumber lain ada. Data-data cukup. Kalau pihak pemerintahan menutup diri tidak masalah. Kan sistem pemberitaan, asal ada konfirmasi. Tapi jika yang dikonfirmasi menolak, tidak mau jawab, tidak masalah.
- P : Terus kan kemarin pihak pemerintah Provinsi Riau sudah melakukan penanganan krisis. Misalnya dengan pengumpulan informasi, terus penjalinan hubungan dengan media massa, media lokal. Bagaimana dari pihak wartawan sendiri menilai penanganan krisis terkait kasus tersebut ?
- N4 : Ya baguslah. Namanya pemerintahan sudah berpengalaman. Negara telah lama merdeka. Organisasi bagus. Ini hanya masalah pimpinan satu orang. Secara otomatis, secara alamiah berpindah dan tidak ada masalah. Apalagi hanya keterlambatan dari pemerintah pusat untuk mengganti Wakil Gubernur menjadi Gubernur. Hanya itu saja masalahnya. Yang lain tidak menjadi masalah. Hanya keterlambatan dalam biaya pembangunan saja.
- P : Kalau dari pihak pemerintah Provinsi Riau ada memberikan pernyataan resmi secara berkala terkait hal tersebut ?
- N4 : Nggak ada. Kalau diwawancara baru ada. Kalau secara resmi, nggak ada.
- P : Terus dengan adanya kasus tersebut, bagaimana opini publik terbentuk mengenai kepemimpinan Annas ? Apakah ada efek yang ditimbulkan bagi citra Pemprov. Riau ?
- N4 : Kemunduran citra jelaslah, pasti ada. Apalagi ini Gubernur Riau ketiga yang ditangkap KPK secara berturut-turut. Pertama Pak Saleh, kedua Pak Rusli, ketiga Pak Annas. Yang jelas, Riau menjadi seperti yang

disampaikan KPK menjadi prioritas utama tentang kondisi korupsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang dapat pelatihan utama dari KPK.

P : Terus terkait kasus tersebut, apakah wartawan mengetahui bahwa ada upaya perbaikan citra Pemprov. Riau yang dilakukan oleh pihak Biro Humas Setda Provinsi Riau ?

N4 : Ada. Tapi itu pula. Mencoba memperbaiki citra, malah terkesan lamban malahan. Sering penyerapan dana APBD terlambat terus. Presentasinya terlambat. Ini mungkin karena ketakutan dari pejabat-pejabat Riau dalam menjalankan pembangunan. Terutama proyek-proyek dalam skala besar. Terus lebih banyak tertunda dan keterlambatan. Karena keterlambatan tersebut kemudian ditunda.

P : Bentuk perbaikan citranya itu gimana ?

N4 : Ya, berulang kali pemerintah bekerja sama dengan KPK mengadakan ee seminar atau pelatihan atau pengarahan dari KPK berulang kali. Kemarin juga baru selesai. Nanti makanya, Desember nanti, Riau menjadi tuan rumah anti korupsi. Hari anti korupsi Indonesia. Karena Riau ini menjadi prioritas utama dari KPK.

P : terus, setelah kasus tersebut berakhir. Masa-masa Annas ditangkap itu lumayan telah lama periodenya, bagaimana pemeritaan di media massa ? Apakah masih memuat berita tentang Annas atau makin lama makin hilang berita tersebut ?

N4 : Makin lama makin hilang, cuma sekarang apalagi sudah vonis sudah hampir tidak ada lagi. Tapi Annas ini masih tersangkut satu kasus lagi. Masalah suap kepada DPRD Provinsi Riau tentang perubahan APBD 2014.

P : Jadi itu lagi yang marak di media massa ?

N4 : He..em... Tapi ya orang tua ini sudah dihukum. Mungkin secara moral, masyarakat Riau sudah memaafkanlah.

P : Terus dari penilaian Bapak, harus dievaluasi ngga penanganan krisis yang dilakukan oleh Pemprov. Riau ?

N4 : Penanganan krisis mungkin untuk dievaluasi tidak. Namun terus dilakukan perbaikan. Karena secara pribadi saya melihat para pejabat di Riau ini masihlah, masih rawan tergoda soal materi. Apalagi APBD di Riau ini tinggi. Duit banyak. Jadi rawan. Jadi harus terus bekerja sama dengan pihak-pihak KPK, kejaksaan , kepolisian, selalu mengawasi para pejabat.

P : Terus bagaimana pendapat Bapak seharusnya keterlibatan wartawan dalam publikasian berita dengan kategori yang bersangkutan terhadap citra Pemprov. Riau ?

N4 : Ya, wartawan pun seharusnya lebih apa. Lebih banyak untuk mengawasi. Tapi ya, orang yang diawasi sendiri menutup diri. Mau gimana ? Itu aja. Mungkin tergantung kesadaran pemerintah itu sendiri. Kalau pejabat-pejabat itu mau diawasi, ya bagus. Kalau tidak, ya gimana. Itu masalahnya. Karena masih banyak yang tergoda. Masih banyak uang-uang di Riau ini masih banyak.

Keterangan :

P : Pewawancara

N4 : Narasumber Keempat

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 5	Yuli Subairie Nasir
---------------------	----------------------------

P : Apakah Anda mengikuti perkembangan kasus suap Annas Maamun?

N5 : Iya

P : Bagaimana penilaian Anda akan kasus tersebut ?

N5 : Secara pribadi saya mengaku prihatin dengan kondisi yang sedang dialami Gubernur Riau saat itu karena secara umum akan berpengaruh pada roda pemerintahan.

P : Lalu bagaimana suasana pemerintahan dan kondisi lingkungan kerja saat kasus tersebut terjadi ?

N5 : Aktivitas di pemerintah Provinsi Riau berjalan seperti biasa, hanya saja melambat.

P : Bagaimana hak-hak Anda sebagai seorang PNS saat kasus tersebut terjadi ? Apakah diterima dengan sesuai ?

N5 : Hak-hak PNS seperti gaji dan tunjangan beban kerja tetap diterima.

P : Bagaimana kasus tersebut kemudian mempengaruhi pola komunikasi dalam pemerintahan ?

N5 : Pasca tertangkapnya Annas Maamun, kondisi pemerintahan Provinsi Riau otomatis tersentak. Namun, informasi terkait kasus tersebut belum dijelaskan secara resmi oleh Pemprov. Riau. Sampai menunggu penjelasan yang resmi dan pihak KPK.

P : Lalu bagaimana kasus tersebut kemudian mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam pemerintahan ?

N5 : Untuk pola pengambilan keputusan pasca tertangkapnya Annas Maamun otomatis Andi Rachman yang saat itu sebagai Wakil Gubernur Riau naik ke puncak kekuasaan sehingga keputusan berada di tangannya, meskipun kewenangan belum penuh sebagai Plt. Gubernur Riau.

P : Terkait citra Pemprov. Riau, apakah Anda melihat ada kemunduran citra bagi Pemprov. Riau saat kasus tersebut terjadi ?

- N5 : Iya, ada. Annas Maamun merupakan Gubernur Riau ke-3 yang terjerat kasus korupsi di KPK. Setelah Saleh Djasit dan Rusli Zainal. Annas Maamun terpilih sebagai Gubernur Riau tahun 2014 dan belum beberapa lama menjalani pemerintahan, Annas Maamun tertangkap tangan dengan dugaan kasus suap.
- P : Lalu bagaimana sepengetahuan Anda pemberitaan di media massa terkait kasus tersebut pada saat itu ?
- N5 : Pemberitaan penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun oleh KPK menjadi *trending topic* di beberapa media massa, baik daerah maupun nasional. Hal itu menimbulkan berbagai bentuk komentar dan tanggapan dari semua pihak, baik masyarakat maupun organisasi dan lembaga pemerintahan.
- P : Bagaimana upaya penanganan krisis terkait kasus tersebut? Apakah melibatkan seluruh staff pemerintahan Provinsi Riau ?
- N5 : Upaya penanganan krisis pemerintahan dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Yang memiliki kewenangan dan sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa melibatkan seluruh staff pemerintahan. Staff-staff pemerintahan difokuskan untuk melakukan pekerjaan dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

Keterangan :

- P : Pewawancara
- N5 : Narasumber Kelima

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 6	Abdul Rahman Aziz
---------------------	--------------------------

- P : Pak, saya mau tanya-tanya nih pak. Bagaimana suasana pemerintahan dan kondisi di lingkungan kerja pada saat terjadi kasus Annas Maamun ?
- N6 : Kalau ini, kalau waktu Pak Annas ditangkap tidak ada seperti biasa. Suasana di lingkungan PNS tidak ada yang berubah. Yang berubah cuman sistem pemerintahan yang berubah.
- P : Contohnya apa Pak, perubahannya ?
- N6 : Contohnya tentang pejabat yang dimutasi oleh semasa Pak Annas menjabat sebagai gubernur. Disitu baru terlihat tidak adanya kerjasama antara pejabat dan staff.
- P : Jadi adanya kasus tersebut menyebabkan adanya kemunduran ngga sistem pemerintahannya, Pak ?
- N6 : Ada. Sistem pemerintahannya pasti agak menurun.
- P : Dinilai dari ?
- N6 : Dinilai dari resapan APBD. Biasanya sebelum Gubernur sebelum Annas, Pak Rusli Zainal, biasanya akhir tahun selalu resapan APBD 80 sampai 90 persen. Semenjak Pak Annas ditangkap tidak pernah mencapai angka 80 sampai 90 persen. Pasti di bawah 80 persen. 60 atau 65 persen.
- P : Kurangnya resapan itu kemudian mempengaruhi ?
- N6 : Mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan pembangunan di Provinsi Riau. Baik itu dari segi fisik, bangunan, sarana dan prasarana, maupun keuangan daerah.
- P : Lalu, untuk hak-hak sebagai PNS pada saat kasus Annas tersebut masih diterima secara tepat waktu atau ada keterlambatan ?
- N6 : Kalau seperti tunjangan-tunjangan tidak ada kendala. Ada terlambat, tidak semua. Paling-paling satu-dua bulan.
- P : Bagaimana pola komunikasi dan pola pengambilan keputusan saat terjadi kasus tersebut ? Ada perubahan ngga, Pak ?

- N6 : Pola ?
- P : Komunikasi
- N6 : Antara ?
- P : Staaf, pejabat. Atasan ke staff ?
- N6 : Ada. Sangat berpengaruh.
- P : Dari segi ?
- N6 : Dalam mengambil keputusan di suatu bagian selalu mengait-ngaitkan dengan orang yang dekat dengan Gubernur atau Wakil Gubernur. Apalagi masalah proyek yang ada di Provinsi Riau. Semua dilakukan pengambilan keputusan selalu mengikuti permintaan dari orang-orang dekat Gubernur atau Wakil Gubernur.
- P : Kalau masa Rusli Zainal ngga ?
- N6 : Masa Rusli Zainal, ada tapi tidak separah waktu Annas sampai dengan sekarang.
- P : Kemarin ada wawancara, masa Annas ini sekat-sekatnya itu sangat terlihat.
- N6 : Iya betul. Sekat-sekat antara orang A orang B nampak. Terlihat di dalam sistem pemerintahan. Misalnya, kepala dinas si A sampai kabid, kasubbid. Semuanya orang-orang mereka. Kadang orang-orang mereka itu kan tidak ada komunikasi ke semua staff. Jadi semua kadang-kadang program yang mau dijalankan tidak selesai.
- P : Dengan adanya kasus tersebut, ada kemunduran citra pemerintah Provinsi Riau, ngga ?
- N6 : Kemunduran citra ada. Banyak. Apalagi masyarakat kurang percaya lagi dengan Pemprov. Baik masa Annas maupun masa sekarang. Karena pembangunan itu tidak berjalan dengan semestinya. Resapan selalu rendah.
- P : Terus dengan adanya kemunduran citra itu, ada ngga staff khusus yang diliat melakukan penanganan krisis ?
- N6 : Staff khusus ada. Cuman tidak mementingkan masalah roda pemerintahan. Yang dipentingkan cuman masalah proyek.

- P : Staff khususnya dari orang pemerintahan, ngga ?
- N6 : Bukan, selalu diambil dari luar pemerintahan. Pihak swasta ataupun kontraktor.
- P : Berarti upaya penanganan krisis terkait kemunduran citra tersebut tidak terlihat ada dilakukan upaya sedikitpun om ?
- N6 : Pencitraan ya ?
- P : Iya.
- N6 : Upaya perbaikan citranya itu kayaknya ngga ada nampak. Contoh aja sekarang. Apa yang mau ditunjukkan ke masyarakat ? Pembangunan saja tidak selalu mencapai target. Seharusnya setiap tahun, setiap dinas mengerjakan program atau kegiatan 80 sampai 90. Ini sekarang, jangankan 60, 50 persen aja sudah susah.
- P : Berarti memperbaiki citra itu, staff dari pemerintahan tidak ada diajak keterlibatannya ?
- N6 : Tidak ada. Dan pimpinan pun tidak mau tahu. Itu yang susah sekarang ini. Harusnya kan pimpinan melihat kesitu.
- P : Berarti harus dilakukan evaluasi ngga om ?
- N6 : Harus dilakukan evaluasi dari atasan sampai bawahan. Benang kusut harus diluruskan. Kalau tidak ya begini-beginilah. Silpa-silpa. Silpa hanya mencapai angka 7 sampai. Eh, 4 sampai 6 Triliun per tahun. Hanya separuh APBD yang bisa digunakan.
- P : Jadi harapannya untuk pemerintahan Provinsi Riau ke depan ?
- N6 : Ya harapannya semakin majulah. Seperti waktu dipimpin Rusli Zainal. Minimal progress APBD bisa mencapai 7 sampai 80 persen setiap tahun.
- P : Makasih ya om.
- N6 : Oke.

Keterangan :

- P : Pewawancara
- N6 : Narasumber Keenam

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Narasumber 7	Teguh
---------------------	--------------

- P : Bagian di humas ada penyajian data kan om ? Terus bagian-bagiannya, om ?
- N7 : Ini kan termasuk penyajian ruangan ini. Karena dia kan menyampaikan ke publik itu apa yang disajikan. Ha ini kan dalam bentuk foto. Ini udah lengkap sama penulisnya. Kalau ngga ditampilkan sama tulisan, foto aja cuman. Nah itu, video. Video ini relatif. Kalau mereka ngga ada siaran di tv. Karena ini kan ada tv lokal. Kalau mereka ngga ada gambar, mereka minta disini. Kalau ngga, mereka cari sendiri.
- P : Untuk penanganan krisis ini om, website dari Humas ngga ada digunain, om ?
- N7 : Karena kan gini. Kalau website ini kan isi-isinya publik menilai. Publik ini bergantung pada apa yang ada di media. Nah media itu kan tentu wartawannya. Wartawannya itu ada pula yang ngurus dari Humas ini, Kasubbag Pers namanya. Biasanya kalau ada kasus yang seperti itu langsung kepala biro yang ngurus. Karena urusannya banyak itu. Banyak macamnya.
- P : Tapi kemarin salahnya itu karena banyak jubir-jubir lain di luar pemerintahan katanya, om ?
- N7 : Nah itu kan karena dia orang partai.
- P : Annas itu om ?
- N7 : Iya, kan dia itu dari partai. Orang-orang partai ini tentu berkepentingan. Kalau pemerintah ini serba salah. Dia ngomong ini takut salah. Takut melebar.
- P : Soalnya kasus personal juga ya om ?
- N7 : Ngga juga. Berapalah kalau dipikir-pikir.

Keterangan :

P : Pewawancara

N7 : Narasumber Ketujuh



DATA NARASUMBER 3

Nama	Eriadi Fahmi
TTL	Kotabaru Reteh, 3 Maret 1980
Jabatan	Kasubbag Hubungan Pers Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau
No. Telp/Hp	0812 6832 975

DATA NARASUMBER 4

Nama	H. Helmi Burman
TTL	Taluk Kuantan, 19 Mei 1964
Jabatan	Wartawan Senior Riau Pos - Mantan Ketua Persatuan Wartawan Riau
No. Telp/Hp	0813 7150 9999
E-mail	Helmiburman2016@gmail.com

DATA NARASUMBER 5

Nama	Yuli Subaire Nasir
------	--------------------

TTL	Kuala Enok, 3 Januari 1980
Jabatan	Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau (Staff TU Sekretariat Daerah Biro Umum)
No. Telp/Hp	0812 7561 1980
E-mail	yulianasubaire@gmail.com

DATA NARASUMBER 6



Nama	Abdul Rahman Aziz
TTL	Tembilahan, 24 Agustus 1972
Jabatan	Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau
No. Telp/Hp	0812 7513 5799
E-mail	doelrahman72@yahoo.com

DATA NARASUMBER 7

Nama	Teguh
Jabatan	Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau (Staff Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau)
No. Telp/Hp	0813 6577 0919